

PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Senda Yunita Leatemia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura
senda_leatemia@yahoo.com

Paul Usmany

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan beberapa uji hipotesis. Sampel sebanyak 87 responden yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari masing-masing OPD Pemerintah Kota Ambon, yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan daerah belum dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan informasi laporan keuangan daerah sulit untuk diakses oleh pihak eksternal.

Kata Kunci: *Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to empirically examine the effect of the presentation and accessibility of regional financial reports on the accountability of regional financial management. This research is a quantitative research with several hypothesis testing. A sample of 87 respondents consisting of heads of offices, secretaries, heads of divisions, heads of sections and staff from each OPD of the Ambon City Government, who are involved in the process of managing regional finances. Based on the t test, it shows that the presentation of regional financial reports has a positive and significant effect on the accountability of regional financial management, while the accessibility of regional financial reports has no effect on the accountability of regional financial management. This is because regional financial reports have not been published openly through the mass media and information on regional financial reports is difficult to access by external parties.

Keywords : *Presentation of regional financial reports, accessibility of regional financial reports, and accountability of regional financial management*

PENDAHULUAN

Pada era reformasi saat ini, pemerintah dituntut untuk mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tiga misi utama otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan

dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Dalam sektor publik akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada publik. Dalam meningkatkan sistem akuntabilitas, maka harus diketahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas.

Faktor yang pertama adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*), serta dapat memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya (Mardiasmo, 2004). Jika dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan jika dilihat dari sisi eksternal organisasi, laporan keuangan dapat dijadikan alat pertanggungjawaban.

Faktor kedua yang dapat meningkatkan sistem akuntabilitas adalah aksesibilitas laporan keuangan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Untuk itu sebaiknya pemerintah membuka ruang akses bagi publik,

tidak hanya kepada DPRD atau pemerintah pusat.

Aksesibilitas (*accessibility*) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006)

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Anthony & Vijay, 2005). Pihak *principal* membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak *agent*, dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan

seperti yang diinginkan oleh prinsipal, dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang. Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (*prinsipal*) memilih orang atau kelompok lain (*agen*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Lupia & Mccubbins, 2000). Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hubungan atau kontrak antara agen dan prinsipal, dimana agen memiliki keunggulan karena memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal. Adapun salah satu informasi yang dimiliki oleh agen adalah berupa laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak agen yang memiliki tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan, serta mempublikasikannya untuk memudahkan akses bagi masyarakat sebagai pihak prinsipal yang memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pemerintahan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Hehanussa, 2015) sedangkan penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang berdasarkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki oleh pihak pengguna laporan keuangan, antara lain :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan

yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Tujuan laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah digunakan sebagai berikut :

(a) Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas (LAK)
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan, hal ini berarti setiap gubernur/bupati/walikota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (bendahara umum negara / kuasa bendahara umum negara / kuasa bendahara umum daerah). Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/defisit selama satu periode yang disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas dana pemerintah selama satu periode (Muzahid, 2014).

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Sedangkan menurut (Apriliani, N K A, 2015) aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam

rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah (Mustofa, 2012). Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak DPRD saja, akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Pada era globalisasi saat ini dimana kecanggihan teknologi yang semakin menggila akhirnya dapat mempermudah pengguna informasi untuk mengakses segala kepentingan yang dibutuhkan yaitu melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Aliyah & Nahar, 2012)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda,

yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran obyektif ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran subyektif (Sadjiarto, 2000) antara lain:

- a. *Probity and legality accountability*, hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Process accountability*, dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan.
- c. *Performance accountability*, pada level ini melihat keefisienan kegiatan yang dilakukan.
- d. *Program accountability*, disini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut.
- e. *Policy accountability*, dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan.

Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari dinas ke pemerintah daerah atau pemerintah pusat (Mardiasmo, 2009). Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dimensi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan akuntabilitas publik dibagi menjadi empat, antara lain:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan

penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

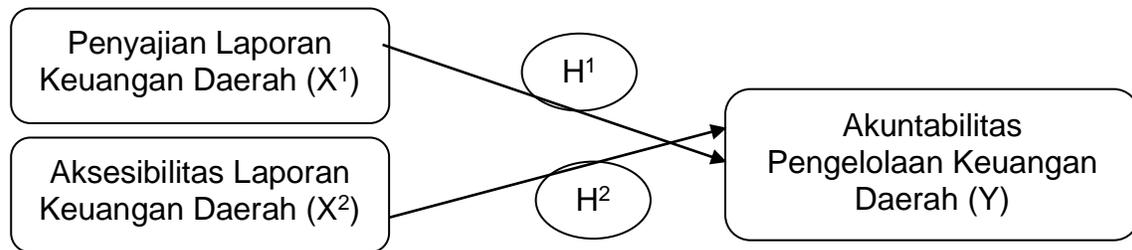
- b. Akuntabilitas proses, akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas memiliki kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan pencapaian tujuan dan pertimbangan alternatif program dengan biaya minimal tetapi dapat memberikan hasil yang optimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H₂: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal dan eksternal laporan keuangan daerah Kota Ambon, yang dalam hal ini populasi yang dituju oleh peneliti adalah seluruh dinas yang termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon, yang berjumlah 17 dinas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
3. Dinas Koperasi & Usaha Mikro
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Dinas Pemuda dan Olahraga
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Perikanan
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Sosial
17. Dinas Tenaga Kerja

Sampel penelitian ini sebanyak 90 orang responden, yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari masing-masing OPD yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang dianggap paling mengerti mengenai sistem akuntabilitas publik terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan seluruh pegawai yang terlibat dalam proses

pengelolaan keuangan daerah, yang telah bekerja lebih dari 2 tahun.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek tanpa melalui perantara (Arikunto, 2006). Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari masing-masing OPD yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Kota Ambon.

Variabel Penelitian

a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ada 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

b. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Hal yang perlu dilakukan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas yaitu perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ada 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan,

yaitu terbuka di media massa, mudah diakses, dan ketersediaan informasi.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (*dependent variable*) merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. (Mahsun, 2006). menjelaskan bahwa ada 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Cara mengumpulkan data pada penelitian ini adalah menggunakan angket (kuisisioner). Kuisisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Data tersebut dikumpulkan dan diolah menggunakan alat Uji Statistik Deskriptif dan Uji Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 17 Dinas yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon dengan menyebarkan kuisisioner kepada 90 responden yaitu kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari masing-masing OPD yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Kuesioner
Jumlah Kuesioner yang disebar	90
Jumlah Kuesioner yang kembali	87
Jumlah Kuesioner yang dapat diolah	87
Tingkat Pengembalian (Respon Rate)	96.7 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Profil Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	39	44.8 %
Perempuan	48	55.2 %
Total	87	100 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Berdasarkan keterangan tabel 2 diatas, dapat diketahui jenis kelamin dari 87 pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu 55,2% atau 48 responden berjenis kelamin perempuan, sedangkan 44,8% atau 39 responden berjenis kelamin laki-laki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
< 30 tahun	6	6.9 %
30 – 50 tahun	66	75.9 %
> 50 tahun	15	17.2 %
Total	87	100 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Berdasarkan keterangan tabel 3 diatas, dapat diketahui umur dari 87 pegawai yang menjadi

responden dalam penelitian ini yaitu 75,9% atau 66 responden berumur 30-50 tahun, sedangkan 17,2% atau 15 responden berumur lebih dari 50 tahun, dan 6,9% atau 6 responden berumur kurang dari 30 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berumur diantara 30 tahun sampai 50 tahun.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
SMA	17	19.5 %
D3	2	2.3 %
S1	63	72.4 %
S2	5	5.7 %
Total	87	100 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa responden mempunyai tingkat pendidikan SMA sebanyak 17 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 63 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan S1.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
< 5 tahun	21	24.1 %
5 – 10 tahun	19	21.8 %
> 10 tahun	47	54.0 %
Total	87	100 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa masa kerja diatas 10 tahun berjumlah paling banyak yaitu sebesar 47 orang atau sekitar 54%. Sementara, responden yang bekerja dalam kurun waktu 5-10 tahun sebanyak 19 orang atau sekitar 21,8% dan responden yang

bekerja dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun sebanyak 21 orang atau sekitar 24,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang menjadi sampel penelitian yaitu kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari 17 OPD yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Kota Ambon mayoritas sudah memiliki pengalaman di bidangnya.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 6. Statistik Deskriptif

	<i>Descriptive Statistics</i>				
	N	Minim um	Maxim um	Mea n	Std. Deviat ion
TOTAL. PLKD	87	27	40	34.1 1	3.381
TOTAL. ALKD	87	7	15	10.6 9	1.774
TOTAL. APKD	87	29	40	33.6 8	3.086
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil ringkasan tersebut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data (N) sebanyak 87. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X₁) mempunyai nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata sebesar 34.11, dan nilai standar deviasi sebesar 3.381. Selanjutnya Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X₂) mempunyai nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum 15, nilai rata-rata sebesar 10.69, dan nilai standar deviasi sebesar 1.774. Selanjutnya Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 29, nilai maksimum 40, nilai rata-rata sebesar 33.68, dan nilai standar deviasi sebesar 3.086. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbilang baik, karena jumlah rata-rata tiap

variabel lebih besar dari standar deviasi tiap variabel.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695 ^a	.484	.471	2.244

a. Predictors: (Constant), TOTAL. ALKD dan PLKD

Uji Simultan F

Tabel 8. Hasil Uji F Hipotesis

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	396.061	2	198.031	39.332	.000 ^b
	Residual	422.927	84	5.035		
	Total	818.989	86			

a. Dependent Variable: TOTAL. APKD

b. Predictors: (Constant), TOTAL. ALKD, TOTAL. PLKD

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: TOTAL. APKD

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Dari tabel 7 hasil analisis data pada Model Summary menunjukkan bahwa nilai R Square adalah 0,484. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2) terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 48,4%, sedangkan 51,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini

Daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$).

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji t Hipotesis

Model	Coefficients					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.568	2.504		4.619	.000
	TOTAL. PLKD	.562	.078	.615	7.158	.000
	TOTAL. ALKD	.276	.149	.159	1.848	.068

a. Dependent Variable: TOTAL. APKD

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 9 sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan tabel 9 hasil pengolahan data untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) diperoleh nilai t -hitung sebesar 7,158. Oleh karena itu nilai t -hitung lebih besar dari t -tabel ($7,158 > 1,987$) dengan

probabilitas $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

2. Berdasarkan tabel 9 hasil pengolahan data untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2) diperoleh nilai t -hitung sebesar 1,848. Oleh karena itu nilai t -hitung lebih kecil dari t -tabel ($1,848 < 1,987$) dengan probabilitas $0,068 > 0,05$, maka H_0 diterima yang berarti variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) diperoleh nilai t -hitung sebesar 7,158 dan p -value sebesar 0,000. Selanjutnya t -hitung dibandingkan dengan t -tabel, yaitu $7,158 > 1,987$ dan p -value dibandingkan dengan α , yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t -hitung lebih besar dari t -tabel dan p -value lebih kecil dari α maka **H1 diterima**. Jadi, ada pengaruh yang signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Hasil tersebut menggambarkan bahwa ketika penyajian laporan keuangan daerah sudah sesuai dari segi kelengkapan dan kualitas, maka penyajian laporan keuangan daerah dapat menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja sehingga kinerja yang direncanakan dapat tercapai, sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban amanah kepada publik.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hehanussa (2015), yang menyatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Dalam penelitian yang dilakukan Mulyana dalam Mustofa (2012) disebutkan bahwa salah satu upaya konkrit untuk

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2) diperoleh nilai t -hitung sebesar 1,848 dan p -value sebesar 0,068. Selanjutnya t -hitung dibandingkan dengan t -tabel, yaitu $1,848 < 1,987$ dan p -value dibandingkan dengan α , yaitu $0,068 > 0,05$. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t -hitung lebih kecil dari t -tabel dan p -value lebih besar dari α maka **H2 ditolak**. Jadi, tidak ada pengaruh yang signifikan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Hasil tersebut menggambarkan bahwa laporan keuangan daerah belum dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan informasi laporan keuangan daerah sulit untuk diakses oleh pihak eksternal.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hehanussa (2015), yang menyatakan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Dalam penelitian yang dilakukan Darmawan (2014) menyatakan melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian melalui aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hal ini bermakna bahwa semakin baik Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) maka semakin baik pula Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X₂) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hal ini disebabkan karena laporan keuangan daerah belum dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan informasi laporan keuangan daerah sulit untuk diakses oleh pihak eksternal.

Saran

Saran untuk OPD Pemerintah Kota Ambon

- a. Sebaiknya dalam menyajikan laporan keuangan, syarat kualitatif dalam menyajikan laporan keuangan harus selalu terpenuhi, yakni andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, serta dalam menyajikan laporan keuangan harus lengkap sesuai standar yang berlaku agar laporan keuangan dapat digunakan oleh *stakeholder* baik dari dalam maupun luar lingkungan manajerial atau pemerintah untuk kebutuhan masing-masing pengguna.
- b. Sebaiknya penyediaan ruang akses laporan keuangan bisa ditingkatkan lagi terutama di *website* atau internet dikarenakan perkembangan teknologi semakin maju dan internet merupakan salah satu sarana yang mungkin diakses publik. Hal tersebut dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman atau asimetri informasi antara pemerintah selaku pihak manajerial dengan publik selaku konstituen.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Melengkapi metode *survey* dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang ada, dan mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap bias jawaban responden.

- b. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 97–189.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4353>
- Anthony, R. N., & Vijay, G. (2005). *Management Control System Buku 2* (Buku 2). Salemba Empat.
- Apriliansi, N K A, D. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *E-Journal Akuntansi*, 3(1).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5162>
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Busniess, Accounting and Management*, 2, 82–90.
<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/294/241>
- Lupia, A., & Mccubbins, M. D. (2000). Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research*, 37, 291–307.
<https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1007068904236>
- Mahsun, M., Firma, S., & Heribertus. (2006). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.).

- BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (I). Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (II). Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mulyana, B. (2006). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah* [Gadjah Mada University].
etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/29394
- Mustofa, A. I. (2012). Accounting Analysis Journal ANALISIS KEBIJAKAN HUTANG. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, 1*(2).
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa_j
- Muzahid, M. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD ACEH UTARA. *Jurnal Akuntansi, 2*(2), 179–196.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/2174>
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, . 1 (2006).
- PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).
<http://epa.sagepub.com/content/15/2/129.short%0Ahttp://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journalarchive/materia1994/46.171?from=CrossRef>
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2*(2), 138–150.
<https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138-150>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 113 180 (2004).
<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 1 (2006).
- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 1 (2003).
https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. UU No. 33 Tahun 2004, 2004 352 (2004).
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>